



Sirkulasi Elite Politik Orde Baru

Ahmad Suhelmi

Nomor inventaris	KBA-KLP-1997-0001
Jenis dokumen	Kliping, 2 halaman
Tanggal terbit	1997
Subjek	Orde Baru; Elite politik; Sirkulasi elite; ABRI; Pers
Status	Koleksi pribadi KBA13 Academy

Ringkasan

Ahmad Suhelmi membaca pengangkatan Jenderal Hartono sebagai Menteri Penerangan dan regenerasi pimpinan ABRI pada pertengahan 1997 melalui teori sirkulasi elite Pareto dan Mills, sebagai persiapan SU MPR 1998.



Oleh Ahmad Suhelmi
Peneliti Laboratorium Ilmu Politik
dan Staf Pengajar Jurusan Ilmu
Politik Fkip U. Depok

Sirkulasi Elite Politik Orde Baru

SOSIOLOG Amerika C. Wright Mills, menulis karya monumental *The Power Elite* (1959). Dalam karyanya itu Mills mengajukan cara menganalisis siapa sesungguhnya tokoh politik yang berkuasa dalam pemerintahan. Yaitu dengan melihat lembaga politik apa yang melekat pada dirinya, apakah itu berupa lembaga kepresidenan, kongres (DPR), Angkatan Bersenjata, partai politik, departemen pemerintahan dan lain-lain. Karena, menurut Mills, kekuasaan politik sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga politik. Maka, seandainya dicopot dari jabatan-jabatan kelembagaan itu, penguasa bersangkutan tidak lagi memiliki makna eksistensial dan politis. Mereka tidak lagi populer dan berkuasa, tidak lebih dari warga negara biasa lainnya.

Elite yang menduduki jabatan-jabatan strategis tidak akan terus bertahan dengan posisinya itu. Secara alamiah, suatu saat terjadi juga perubahan elite kekuasaan, melalui cara damai, demokratis, atau kekerasan politik (revolusi). Proses pergantian elite politik itu adalah merupakan bagian dari apa yang disebut Vilfredo Pareto *circulation of elite* (sirkulasi elite) (Pareto dalam Olsen, 1970: 114-122).

Bagaimana, kapan, dan siapa yang menentukan terjadinya sirkulasi elite itu tergantung pada berbagai variabel. Dalam sistem politik Indonesia variable itu bisa berupa lembaga kepresidenan, struktur sistem politik yang birokratik (*bureaucratic polity*), kekuatan 'arus bawah', atau tangan-tangan kekuasaan yang tak tampak (*invisible hands*).

Sirkulasi elite terjadi dalam pekan-pekan terakhir di negeri kita dengan terjadinya dua peristiwa penting: *Pertama*, pengangkatan KSAD Jenderal Hartono menjadi Menteri Penerangan menggantikan Harmoko yang mendapat tugas baru sebagai Menteri Urusan Khusus (Mensus). Bila sebelumnya Hartono merupakan elite militer, kini beliau menjadi elite politik. Harmoko yang sebelumnya elite eksekutif, kini menjadi elite legislatif. *Kedua*, regenerasi di tubuh ABRI dengan naiknya sejumlah perwira Angkatan Baru seperti Wiranto dan Subagyo HS ke posisi puncak menggantikan perwira-perwira senior yang memasuki masa purnabakti atau mutasi ke posisi-posisi lain.

Lompatan kemustahilan

Apakah makna kedua peristiwa ini dilihat dari kacamata politik? Sirkulasi elite akhir-akhir ini, yang oleh pengamat politik Riswanda Imawan disebut 'lompatan kemustahilan', merupakan suatu rekayasa politik untuk mengamankan SU MPR dan suksesi kepemimpinan nasional mendatang. Diangkatnya Hartono sebagai Menpen dan regenerasi ABRI itu bermakna strategis bagi usaha memusnahkan kedua event politik itu.

Sebagai perwira berpengalaman di bidang militer dan intensif terlibat dalam persoalan-

persoalan politik bangsa (misalnya ketika menjadi Pangdam Bawijaya dan Kassopol ABRI), Hartono bukanlah 'orang asing' di dunia pers. Beliau kenang makan asam garam dunia informasi, komunikasi, media cetak, dan elektronik. Maka, tugas barunya di Deppen diyakini beberapa kalangan akan bisa ditangani secara baik. Adalah kurang berdasar bila timbul keraguan terhadap kemampuan Hartono mengelola Deppen semata-mata karena alasan beliau seorang perwira militer. *Toh*, dua mantan Menpen sebelum Harmoko, yakni Ali Murtopo dan Budiarjo adalah perwira ABRI yang dinilai berhasil mengelola departemen itu.

Dengan bekal pengalaman yang luas, bisa diprediksikan sejak awal bahwa Menpen Hartono akan menjalankan tugas 'dwifungsinya', yaitu menjalankan fungsi departemen penerangan sekaligus fungsi pertahanan keamanan. Menangani tugasnya sebagai Menpen, Hartono tetap melanjutkan implementasi kebijakan yang telah digariskan Harmoko. Misalnya antara lain, tetap memberlakukan SIUPP seandainya memang diperlukan dan bisa dijadikan 'alat kontrol' efektif terhadap dunia pers. Hal itu dikemukakannya tidak lama setelah pelantikannya: "Kalau aturannya memang ada dan pantas diambil, mengapa tidak. Karena itu, wartawan *mboh* jangan membuat berita yang memaksa pemerintah membatalkan SIUPP yang telah diberikan" (*Media Indonesia*, 7/6/1997).

Deppen di bawah Hartono dengan demikian akan tetap menetapkan kebijakan-kebijakan pers yang kental bernuansa demi menjaga stabilitas keamanan. Seandainya hal itu terjadi, maka meminjam istilah Eep Saifullah Fatah, Hartono akan melakukan pengintegrasian fungsi penerangan dengan fungsi pengamanan (*Adil*, 11-17/6/1997). Bila di masa Harmoko 'kontrol' terhadap pers demikian kuat, maka di masa Menpen Hartono kontrol itu mungkin akan tetap dipertahankan. Bahkan, mengingat situasi sosial politik dalam negeri menjelang SU MPR mungkin akan memanas, kontrol terhadap pers bisa semakin diperketat. Maka, bisa dipahami (meski sulit diterima khususnya oleh insan pers) dalam rentang waktu sepuluh bulan ke depan pembinaan pers akan kental diwarnai oleh kebijakan pengamanan demi memuluskan SU MPR 1998.

Mengenai jabatan baru Harmoko yang akan berakhir Oktober mendatang, tiak lain hanyalah *waiting room* (ruang tunggu) baginya sebelum memegang jabatan yang lebih strategis. Ketua DPR/MPR RI periode 1998-2003. Tugasnya sebagai Mensus bersifat khusus, membekali calon anggota legislatif agar kerja mereka efisien, efektif, dan optimal serta menyamakan misi maupun visi para caleg. Ada sementara pengamat menilai tugas pembekalan itu dirasakan sebagai indoktrinasi, pendiktean, dan intervensi Mensus terha-

dap 'kedaulatan' ketua-ketua fraksi di DPR mendatang.

Bagi Harmoko sendiri penyamaan misi dan visi itu diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya permainan politik di luar skenario yang telah dirumuskan. Antara lain seperti yang terjadi dalam kasus Sri-Bintang Pamungkas, Bambang Warih, atau Brigjen Ibrahim Saleh. Dalam kasus Ibrahim Saleh, anggota F-ABRI ini pernah membuat 'kericuhan' dengan menginterupsi ketetapan ketua sidang DPR/MPR yang mencalonkan kembali Sudharmono sebagai Wapres untuk periode 1993-1998. Bambang dan Bintang, mungkin karena memiliki visi dan misi berbeda dengan orsospolnya, sempat mengkritik tajam kebijakan-kebijakan organisasinya. Karena dinilai menyimpang dari garis politik orsospol mereka, Bambang dan Bintang kemudian di-*recall* dari DPR.

Sirkulasi elite kedua terjadi di tubuh ABRI. Perwira-perwira tinggi yang memasuki masa pensiun digantikan oleh perwira yuniornya. Jabatan KSAD yang semula dipegang oleh Jenderal Hartono kini dijabat oleh Jenderal Wiranto. Letjen Subagyo, sebelumnya Pangdam Diponegoro, menjabat Wakasad. Letjen Sugiono, semula Danpaspampres, menjabat Pangkostrad menggantikan Jenderal Wiranto.

Pos-pos strategis militer lainnya juga mengalami pergantian pimpinan. Mungkin dalam waktu dekat akan terjadi pergantian di posisi paling puncak di tubuh ABRI, penggantian Pangab. Jenderal Feisal Tanjung akan memasuki masa pensiun Juli ini. Karena masa jabatan beliau telah diperpanjang sebelumnya, maka perpanjangan selanjutnya nyaris sulit dilakukan. Kecuali tentunya, atas dasar hak prerogatif Presiden, menghendaki beliau tetap dalam jabatannya sebagai Pangab.

Spekulasi politik

Regenerasi di tubuh ABRI adalah peristiwa biasa. Tidak ada yang mengejutkan sebab pergantian para perwira ini merupakan tradisi yang telah berlangsung lama di ABRI. Hanya, karena regenerasi itu terjadi menjelang suksesi kepemimpinan nasional dan SU MPR, peristiwa itu menjadi amat menarik dan menimbulkan berbagai spekulasi politik. Spekulasi politik yang berkembang karena sirkulasi elite itu antara lain:

Pertama, pengangkatan Wiranto menjadi KSAD adalah usaha Pangti ABRI (Presiden Suharto) mempersiapkan mantan Pangkostrad itu menjadi Pangab. Jenderal Feisal Tanjung dalam waktu dekat (Juli 1997) akan memasuki usia pensiun. Wiranto dinilai perwira yang paling cocok menggantikan beliau, mengingat, selain telah menjadi jenderal dalam usia relatif muda (50 tahun, lulusan AMN 1968), karier militer Wiranto juga tergolong cemerlang selama ini. Ada yang menolok spekulasi ini karena sulit bagi Wiranto menjabat Pangab sebab ia baru saja (sebulan) diangkat menjadi KSAD.

Kedua, Jabatan KSAD yang dipegang Wiranto menjadikan dirinya 'lokomotif' penarik sejumlah perwira-perwira yunior di bawahnya untuk 'naik ke atas' memegang posisi-posisi strategis yang lebih tinggi di jajaran ABRI. Ditinjau dari sisi hierarkis-organisatoris hal itu positif karena menunjukkan terjadinya regenerasi kepemimpinan ABRI yang sehat, berkesinambungan, bersifat alamiah (natural) dan tanpa konflik antara perwira senior dengan perwira yunior. Harus diakui, dalam masalah regenerasi kepemimpinan, ABRI memiliki mekanisme dan sistem yang jauh lebih baik daripada mekanisme dan sistem regenerasi kepemimpinan di kalangan sipil. Keunggulan ABRI dari segi tersebut antara lain karena faktor-faktor yang disebut *S E Finer* seperti tingginya semangat *corps* (*esprit de corps*), loyalitas penuh pada atasan dan hierarki yang jelas (Finer, 1962);

Ketig, pergantian perwira itu juga dimaksudkan untuk mempersiapkan situasi politik dan pertahanan keamanan yang benar-benar stabil dalam sepuluh bulan mendatang agar pelaksanaan SU MPR dan proses suksesi nasional berjalan mulus tanpa gejolak sosial politik yang berarti. Presiden Soeharto sebagai Pangti ABRI menyadari sepenuhnya bahwa gejolak sosial dan gangguan keamanan sekecil apa pun dapat mengganggu kelancaran SU MPR dan proses suksesi nasional.

Sirkulasi elite politik sipil dan militer saat ini menarik karena semakin meneguhkan kenyataan selama ini bahwa presiden adalah satu-satunya kekuatan politik tunggal yang paling *powerful* dan legitimatif melakukan pergeseran elite politik di level atas. Atas dasar hak-hak prerogatifnya, kapan pun elite elite militer dan politik dalam struktur kekuasaan Orde Baru bisa dimutasi atau dikukuhkan kembali semata-mata karena pertimbangan pribadi presiden. Kenyataan ini mengingatkan banyak pengamat politik akan tesis Bill Liddle dan Karl D Jackson mengenai sifat kekuasaan dan sistem politik Orde Baru.

Mengamati besarnya kekuasaan presiden dalam menentukan berbagai proses politik yang terjadi di Indonesia, Liddle (1985) berkesimpulan bahwa kekuasaan Orde Baru dicirikan oleh kuatnya kekuasaan personal (*personal rule*) Presiden Soeharto, bukan kelembagaan politik (*political institution*) seperti DPR/MPR. Negara sebagai institusi kekuasaan relatif kurang otonom. Tesis Liddle diperkuat oleh tesis Jackson (1978), meski banyak dikritik karena kelemahan-kelemahannya, bahwa dalam masyarakat birokratis (*bureaucratic polity*) seperti Indonesia, kekuasaan terpusat pada segelintir elite politik nasional. Kebijakan-kebijakan politik yang menentukan kehidupan nasional ditentukan oleh elite nasional itu, karena massa secara sosial, ekonomi, dan politik pasif. Wallahu a'lam bissawab.***